

## PENGEMBANGAN UKM BERDAYA SAING BERBASIS PADA ELIJIBILITAS (KEMAMPUTERAPAN) SAK-ETAP DAN ATURAN PENYALURAN KREDIT PERBANKAN

Eka Murtiasri

Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof H Sudarto, SH Tembalang Semarang 50269  
eka.murtiasri@yahoo.com

**Abstract:** *This research aims to determine the readiness of SMEs in facing the era of economic liberalization of ASEAN in 2015 through the ability to access the acquisition of funding sources according to the requirements issued by Bank Indonesia through the preparation of financial statements based SAK ETAP and preparation of feasibility minimum standards of business (business plan). The analysis method used in this research is quantitative and qualitative methods. Quantitative methods used: descriptive statistics, factor analysis and comparative analysis. Whereas qualitative analysis methods using depth interviews and focus group discussions. The results show that SMEs have limited access to sources of funding due to the low ability to prepare financial statements and business plan in a comprehensive manner, although there is evidence that SMEs are partial able to manage the recording of transactions, keep records of cash flow in and out and make simple cash flow reporting, the process of recording sales, merchandise inventory, debt and receivables. This means that SMEs are not ready yet to implement the application of SAK-ETAP and have not been able to devise a business plan proposal correctly so their readiness to welcome AEC 2015 is still not good.*

**Keyword:** *SMEs, financial report, business plan, MEA 2015*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan UKM dalam menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN 2015 melalui pengukuran kemampuan UKM mengakses perolehan sumber dana sesuai persyaratan yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP dan penyusunan standar minimum kelayakan bisnis (*business plan*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan: statistik deskriptif, analisis faktor dan analisis perbandingan. Sedangkan metode analisis kualitatif menggunakan *depth interview* dan *Focus Group Discussion*. Hasil kajian menunjukkan bahwa UKM memiliki akses yang rendah terhadap sumber dana disebabkan karena rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan dan *business plan* secara komprehensif, meskipun ditemukan bukti bahwa secara parsial UKM mampu mengelola transaksi, melakukan pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, dan utang piutang serta mampu menyusun laporan arus kas sederhana. Secara umum disimpulkan bahwa UKM belum siap dalam mengimplementasikan penerapan SAK-ETAP dan belum mampu menyusun proposal rencana usaha dengan benar sehingga belum siap menyongsong MEA 2015.

**Kata kunci:** *UKM, laporan keuangan SAK-ETAP, rencana usaha, MEA 2015*

## PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Kecil Meneengah (UKM) menjadi suatu hal yang krusial dewasa ini mengingat UKM mempunyai peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah negara termasuk Indonesia. Sebagai ilustrasi, UKM di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74% dari total serapan tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp.1.013,5 triliun atau 56,73% (BPS, 2012). Besarnya kontribusi ini, menunjukkan bahwa UKM mempunyai kemampuan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.

Meskipun secara ekonomi UKM mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam pengembangannya UKM menghadapi berbagai permasalahan. Menurut penelitian Winarni (2006) dan Situmorang (2008) permasalahan yang dihadapi UKM adalah: (a) kurangnya permodalan, (b) kesulitan pemasaran, (c) struktur organisasi sangat sederhana (d) kualitas manajemen rendah, (e) SDM/tenaga kerja memiliki *skill* terbatas dan berkualitas rendah, (g) tidak dapat menyusun laporan keuangan, (h) aspek legalitas lemah, dan (j) rendahnya kualitas serapan teknologi. Dari beberapa permasalahan tersebut, penyebab utama permasalahan adalah pengelolaan manajemen UKM yang rendah dan ketidakmampuan pelaku UKM menyusun laporan keuangan sebagai ukuran kinerja finansial. Tidak disusunnya laporan keuangan berdampak pada tidak dimilikinya akses ke sumber dana bagi UKM untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan akses terhadap modal kerja membuat UKM berada dalam skala usaha terbatas, sehingga jaringan usaha, kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar menjadi terbatas yang secara tidak langsung menyebabkan UKM tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Terbukanya pasar keuangan ASEAN Program pengembangan UKM dalam kerangka *Asean Economic Community* 2015 dilaksanakan dengan tujuan pertumbuhan

ekonomi yang dapat dinikmati oleh UKM. Mengacu pada *ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD)* 2004–2014, pelaksanaan pasar *AEC* memberikan peluang untuk semakin terbukanya akses bagi UKM kepada sumber-sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan internasional. Pada kondisi ini, UKM-UKM di negara ASEAN menghadapi tantangan yang cukup berat karena persaingan yang semakin ketat. Sebagai bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia, UKM perlu mendapatkan bekal peningkatan daya saing dengan meningkatkan kemampuan UKM kepada akses keuangan.

Penelitian ini menitikberatkan kajian terhadap peningkatan akses kepada sumber keuangan, karena pada kondisi ini UKM masih memiliki banyak keterbatasan dan kendala. Pada umumnya, terdapat 3 kendala/kesenjangan yang terjadi antara UKM dengan sumber pendanaan, yaitu:

1. Kesenjangan informasi, yaitu kesenjangan antara informasi akses perolehan dana yang disyaratkan bank/lembaga keuangan dengan informasi yang dimiliki UKM;
2. Kesenjangan formalitas, yaitu kesenjangan antara formalitas dokumen serta prosedur yang harus dipenuhi UKM dan yang saat ini dimiliki UKM;
3. Kesenjangan skala usaha, yakni jumlah kredit yang dibutuhkan UKM dan plafon kredit yang direalisasikan oleh bank.

Bagi sumber dana (pihak bank), realisasi penyaluran kredit baru (net ekspansi) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 hanya mencapai 66,8% atau setara Rp 85,6 triliun dari target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2011 yang sebesar Rp 128,2 triliun. Bank Indonesia (BI) menilai hal tersebut bukan lantaran perbankan sulit menyalurkan kredit tetapi karena permasalahan klasik yang dihadapi UKM yaitu ketidakmampuan pengelola UKM dalam membuat kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan

tenaga kerja (Bank Indonesia, 2005). Secara umum dapat disimpulkan bahwa minimnya akses keuangan UKM terutama disebabkan oleh belum terdapat kesamaan pandangan dan persepsi antara persyaratan bank yang harus dipenuhi dengan persepsi yang dimiliki oleh UKM, terutama mengenai syarat disusunnya laporan keuangan dan rencana pengembangan usaha (*business plan*).

Pihak perbankan, yang memiliki kepedulian dan memfokuskan bisnisnya pada pasar UKM telah melakukan langkah proaktif dalam membantu calon debitur UKM menyusun suatu *business plan* (rencana usaha) dan menyusun laporan keuangan yang diperlukan dalam analisis kredit. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan konstruksi laporan keuangan, atau setidaknya menjadi suatu catatan perhitungan laba rugi. Walaupun laporan keuangan yang dikonstruksi tersebut bersifat *proforma*, namun dapat dijadikan *proxy* untuk mengetahui besarnya pinjaman yang diperlukan, sumber pelunasan kredit serta kemampuan membayar kembali calon debitur.

Terkait dengan hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan *exposure draft* Standar Akuntansi dan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari *International Financial Reporting System (IFRS) for Small and Medium Enterprise*. ED SAK UKM ini telah disesuaikan isinya dengan kondisi UKM di Indonesia dan disahkan untuk dipergunakan menjadi Standar Akuntansi dan Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan praktek akuntansi bagi entitas usaha di Indonesia, utamanya pelaku UKM mengingat isinya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha UKM.

Program pengembangan UKM sebagaimana tercantum dalam APBSD, tampak sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi UKM di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN tahun 2015 perlu ada persiapan baik dalam hal *softskill* maupun

infrastruktur, sehingga UKM Indonesia mampu dan siap menghadapi era pasar keuangan bebas tersebut, khususnya dalam perluasan akses keuangan. Secara spesifik, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Rendahnya kemampuan UKM dalam menyusun Laporan keuangan sesuai SAK ETAP yang berdampak pada rendahnya akses keuangan ke sumber dana.
2. Rendahnya kemampuan UKM dalam menyusun *Business plan* sesuai dengan standar minimum kualitas kelayakan bisnis yang disyaratkan sumber dana.
3. Rendahnya kesiapan UKM dalam menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN dalam mengakses informasi dan perubahan-perubahan standar yang berlaku.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Mengkaji akses perolehan sumber dana bagi UKM melalui penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2. Memenuhi standar minimum kelayakan bisnis bagi UKM melalui penyusunan *Business plan* yang disyaratkan sumber dana.
3. Meningkatkan kesiapan UKM dalam menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN melalui percepatan akses terhadap informasi.

Pemetaan kemampuserapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pembuatan *business plan* bermanfaat bagi pemangku kepentingan khususnya pihak sumber dana dan IAI dalam menentukan standar minimum laporan keuangan dan *business plan* yang sesuai dengan kemampuan UKM sebagai acuan/pedoman bagi lembaga-lembaga pengembang UKM dalam melihat kesiapan dan kemampuan UKM mengakses informasi terhadap aturan baru.

Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta telah dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) maka diperlukan keberadaan ketentuan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit

atau pembiayaan oleh Bank Umum kepada UMKM yang sekaligus mampu mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya. Sebagai salah satu bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif, keberpihakan kepada sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada *pro growth, pro poor* dan *pro job*.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI meliputi:

- a. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/ pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.
- b. Pencapaian target kredit/pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling* dan pembiayaan bersama.
- c. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah diharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. Kegiatan bantuan teknis dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah Bank Umum, BPR/BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) dan UMKM. Bantuan teknis yang disediakan oleh Bank Indonesia di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan *capacity building* UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari perbankan.
- e. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, bank umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rencana bisnis bank; laporan bulanan bank umum; laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu; sistem informasi debitur; transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- f. Lebih lanjut dalam pokok-pokok PBI di atas, juga diatur tentang perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program pengembangan UMKM.
- g. Bank Umum yang melanggar hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi.

PBI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 21 Desember 2012. Namun, khusus pengaturan untuk pencapaian rasio Pembiayaan UMKM mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014. Pada saat PBI ini berlaku, maka PBI No.7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, peraturan pelaksanaan dari PBI No.7/39/PBI/2005, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.

#### **Penerapan Ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia terhadap Standar Akuntansi ETAP (SAK-ETAP)**

Pada tanggal 17 Juli 2011 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standard ini sedikit unik karena *exposure draft*nya diberi nama

Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standard ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi.

SAK-ETAP akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit

dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.

### **Laporan Keuangan UKM sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Laporan Keuangan merupakan suatu hasil dari beberapa aktivitas dalam kegiatan akuntansi. Definisi yang umum dipergunakan untuk menjelaskan terminologi “akuntansi” adalah sebagaimana dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* bahwa “Akuntansi adalah suatu seni tentang pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, dengan cara yang informatif dan bentuk uang, transaksi atau kejadian keuangan perusahaan, dan interpretasi atas hasilnya“. Dengan demikian, proses akuntansi mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: proses mencatat, menggolongkan, meringkas atau menjumlah, dan melaporkan.

Sejalan dengan keinginan untuk mencapai adanya suatu bentuk yang sama dalam hal akuntansi pencatatan dan pelaporan, *International Accounting Standard Board (IASB)* menyusun suatu acuan standar akuntansi keuangan internasional yang disebut sebagai *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Dengan demikian, diharapkan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan disesuaikan dengan standar tersebut sehingga kinerja perusahaan antar negara dapat diperbandingkan dalam kerangka standar yang sama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan banyaknya entitas usaha dengan skala kecil dan menengah, maka IASB menerbitkan acuan standar akuntansi pencatatan dan

pelaporan bagi entitas skala tersebut, yang disebut dengan *IFRS for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs)*. IFRS for SMEs merupakan modifikasi dan simplifikasi dari IFRS pokok yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan adanya standar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sederhana dan tidak banyak membebani pengguna. Terminologi SME yang dipergunakan oleh IASB diartikan sebagai "Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan bagi pengguna eksternal serta tidak memiliki akuntabilitas publik". Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, definisi ini mengacu pada entitas usaha privat (*private entities*). Atas dasar definisi tersebut dan praktek di lapangan, maka penyebutan IFRS for SMEs diubah menjadi *IFRS for Private Entities*. Sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar internasional, pada tanggal 16 Desember 2008 telah dilansir *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan beberapa modifikasi yang diperlukan.

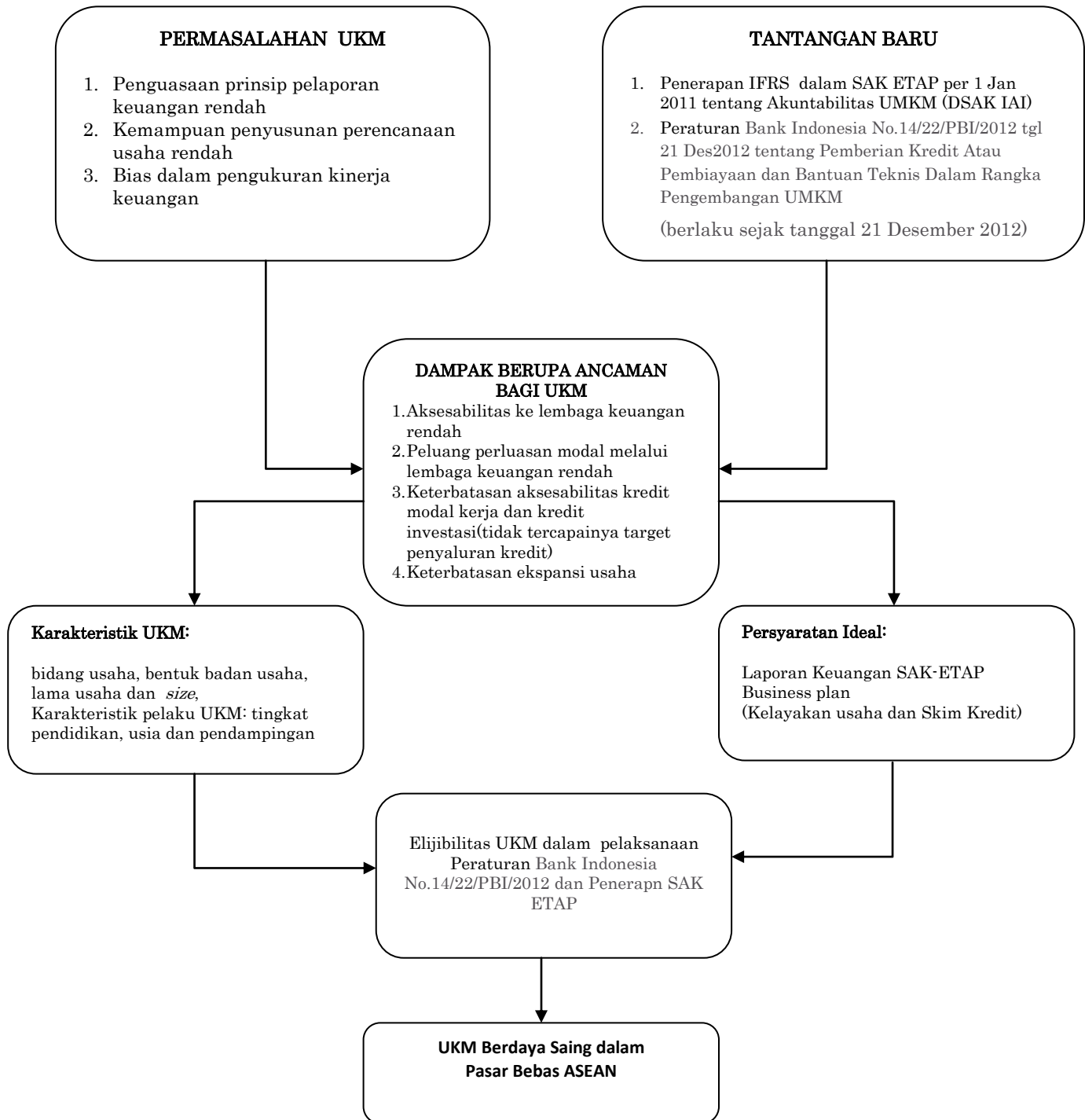
Dalam perkembangannya, dengan memperhatikan definisi yang dipergunakan oleh IASB mengenai UKM, praktek/definisi yang dipergunakan di negara lain, perubahan terminologi yang dilakukan oleh IASB, serta kondisi nyata entitas UKM di Indonesia, ED SAK UKM diubah dan diformalkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009. Dalam SAK ETAP telah dilakukan modifikasi dan simplifikasi atas ED SAK UKM sehingga diharapkan akan lebih mudah dilaksanakan oleh entitas UKM di Indonesia. Definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang: tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SAK ini dapat digunakan untuk seluruh entitas usaha yang tidak *go public*, tidak mengerahkan dana dari masyarakat serta laporan keuangan yang dihasilkan ditujukan untuk pengguna eksternal. Sesuai SAK ETAP, laporan keuangan entitas lengkap meliputi : 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas (Laporan Perubahan Modal); 4) Laporan Arus Kas, dan 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan.

### Kerangka Teoritis



**Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian**

Sumber: kerangka yang dikembangkan untuk penelitian ini

## METODE

Jumlah populasi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Semarang berdasar data BPS Kabupaten Semarang tahun 2010 adalah sebanyak 9.405 unit usaha kecil dan 1.439 unit usaha menengah. Penarikan sampel dilakukan secara *purposive* sampling untuk UKM yang memenuhi syarat tertentu, yaitu telah beroperasi minimal 3 tahun dan pernah mengajukan pemenuhan modal kerja pada lembaga keuangan.

Tahapan-tahapan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah: *pertama*, menentukan wilayah dan jumlah UKM yang akan dianalisis. *Kedua*, menentukan *size* UKM berdasarkan asset yang dimiliki. *Ketiga*, mengamati cara UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. *Keempat* mengamati UKM yang telah memanfaatkan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, *kelima*, menganalisis tingkat keberhasilan UKM dalam mengakses tambahan modal kerja. *Keenam*, melakukan uji coba penerapan SAK ETAP pada UKM terpilih. *Terakhir*, mengevaluasi kemampuan UKM dalam penerapan SAK ETAP.

### Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi  
Data dokumentasi berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang, Lembaga keuangan penyalur modal kerja serta publikasi berbagai lembaga terkait dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperlukan dalam menentukan jumlah UKM aktif pada berbagai sektor usaha.
2. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden. Pertanyaan dalam kuesioner dibagi dalam 2 kategori yaitu pertanyaan terbuka untuk mengetahui deskripsi responden. Pertanyaan pilihan untuk mengetahui kesiapan UKM dalam menerapkan SAK ETAP

3. Observasi  
Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan, cara kerja dan kondisi UKM dalam mengakses sumber dana.
4. Wawancara  
Wawancara dilakukan melalui 2 metode: *In depth interview* atau wawancara mendalam, merupakan proses mengumpulkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada para pelaku UKM, pihak penyedia dana dan Dinas terkait yang berkepentingan dengan UKM dan *Focus Group Discussion (FGD)*, untuk menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman suatu kelompok. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap pemaknaan kelompok berdasar hasil diskusi pada permasalahan tertentu.

### Variabel Penelitian dan Cara Pengukuran

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel-variabel tersebut adalah: bidang usaha dan bentuk badan usaha, lama usaha UKM, *size* UKM, dan karakteristik pelaku UKM meliputi tingkat pendidikan, usia dan pendampingan yang pernah didapat pelaku UKM. Indikator, definisi operasional dan skala pengukuran variabel yang akan diteliti dapat dicermati dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Indikator, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Pelaku usaha	Laki-laki Perempuan	Jenis kelamin mencerminkan gender pelaku UKM	Skala Nominal
Bidang dan Jenis Usaha	Bidang usaha/sector yang dimasuki	Bidang usaha yang dipilih berdasarkan ketrampilan dan penguasaan pengelolaan dari para pelaku UKM.	Skala Nominal
Bentuk Perusahaan	Bentuk formal (berbadan hukum/tidak)	Pemilihan bentuk kepemilikan badan usaha ditentukan oleh besar kecilnya jenis usaha dan sumber daya yang dimiliki dan status hukum.	Skala Nominal
Wilayah Usaha	Jangkauan wilayah pemasaran	Rentang jangkauan pemasaran atau posisi pelanggan/pengguna produk	Skala ordinal
Luas usaha	Jumlah karyawan tetap dan karyawan tidak tetap	Karyawan tetap merupakan karyawan yang selalu ada di perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi sedangkan Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang dibutuhkan jika kegiatan produksi meningkat	Skala interval
Ukuran usaha	Jumlah omset yang dimiliki	Jumlah omset menggambarkan skala usaha dan kemampuan finansial unit usaha	Skala rasio
Kepemilikan usaha	Jumlah Modal sendiri	Jumlah modal sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan menggunakan modal pemilik dalam membiayai kegiatan produksi	Skala rasio
Pengelolaan Transaksi (Jurnal dan buku besar)	Kemampuan mencatat dan mengelola bukti transaksi	Melakukan prosedur pencatatan, penggolongan dan penyimpanan bukti transaksi sesuai dengan SAK	Skala interval
Pengelolaan Arus Kas	Kemampuan mencatat dan melaporkan kas masuk dan kas keluar	Melakukan prosedur pencatatan, dan pengelolaan kas dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi dan melaporkannya sesuai dengan SAK	Skala interval
Pengelolaan Penjualan, Persediaan, Utang dan Piutang	Kemampuan mencatat dan melaporkan transaksi Penjualan, Persediaan, Utang dan Piutang	Melakukan prosedur pencatatan dan melaporkan pengelolaan transaksi Penjualan, Persediaan, Utang dan Piutang	Skala interval
Penyusunan Laporan Keuangan	Kemampuan melakukan proses penyusunan laporan keuangan UKM	Melakukan proses menyusun Neraca dan Laba Rugi sesuai dengan SAK	Skala interval
Penyusunan <i>Business plan</i>	Kemampuan melakukan proses <i>Business plan</i> sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Melakukan proses penyusunan proposal kelayakan usaha mulai dari perencanaan produk hingga pendanaan yang dibutuhkan dengan benar	Skala interval

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini adalah para pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang. Penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* untuk UKM yang memenuhi syarat tertentu, yaitu telah beroperasi minimal 3 tahun dan pernah mengajukan pemenuhan modal kerja pada lembaga keuangan. Berdasar metode *purposive* diperoleh jumlah sampel 45 pelaku UKM. Kepada 45 sampel ini kemudian dilakukan wawancara terstruktur dan diberikan kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka sebagai cara mengungkap kemampuan pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan dan penyusunan rencana usaha (*business plan*).

Dari 45 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner, diterima kembali 42 kuesioner, namun 2 (dua) kuesioner tidak lengkap pengisiannya, sehingga hanya 40 kuesioner yang digunakan dalam analisis.

### Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin, Bidang Usaha, Bentuk Perusahaan, Daerah Pemasaran

Jumlah pelaku usaha berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (47.5%) dan lainnya 21 orang (52.5%) berjenis kelamin perempuan dengan mayoritas bidang usaha adalah industri pengolahan yaitu sebesar 23 UKM (57.5%), 2 UKM (5%) bergerak di bidang aneka jasa, 2 UKM (5%) bergerak di bidang perdagangan dan sisanya 13 UKM (32.5%) bergerak di bidang selain yang disebutkan di atas.

Mayoritas usaha reponden berbentuk perusahaan perseorangan yaitu sebesar 32 (80%), lainnya sebanyak 4 UKM (10%) berbentuk CV dan sisanya yaitu 4 UKM (10%) berbentuk selain PP dan CV. Adapun daerah pemasaran sudah menjangkau wilayah nasional/antar propinsi yaitu sebesar 20 UKM (50%). Sisanya memiliki daerah pemasaran di wilayah Propinsi yaitu sebesar 22.5 %, wilayah Kabupaten sebesar 20%, wilayah Kecamatan sebesar 5% dan terdapat 1 UKM (2.5%) pemasarannya telah menembus wilayah Internasional/melakukan ekspor.

### Identitas Pelaku Usaha Berdasarkan Omset Produksi, Jumlah Karyawan Tetap dan tidak tetap serta Kepemilikan Modal Sendiri

Dari pelaku usaha yang diteliti (18 UKM atau sebesar 45%) memiliki omset rata-rata per bulan mencapai Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 9.900.000,00. Terdapat 5 UKM dengan omset diatas Rp. 20.000.000,00, dan 3 UKM dengan omset Rp. 15.000.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00. Sisanya, 1 UKM dengan omset Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 14.900.000,00 dan terdapat 13 UKM yang omsetnya masih dibawah Rp. 5.000.000,00.

Berdasarkan jumlah karyawan tetap yang dimiliki 28 UKM (70%) memiliki jumlah karyawan tetap kurang dari 5 orang. Lainnya, 9 UKM (22.5%) memiliki karyawan tetap 6 sampai 10 orang, 2 UKM (5%) memiliki karyawan tetap 11 sampai 15 orang dan hanya 1 UKM (2.5%) yang memiliki karyawan tetap lebih dari 15 orang. Terdapat 28 UKM (70%) yang diteliti memiliki karyawan tidak tetap kurang dari 5 orang, lainnya, 11 UKM (27.5%) memiliki karyawan tidak tetap 6 sampai 10 orang, dan sisanya yaitu sebanyak 1 UKM (2.5%) memiliki karyawan tidak tetap 11 sampai 15 orang.

Terdapat 14 UKM (35%) memiliki modal sendiri kurang dari Rp. 10.000.000,-. Lainnya dan merupakan bagian terbesar yaitu 24 UKM (60%) memiliki modal sendiri Rp. 10.000.001,- s.d Rp. 20.000.000,- sampai 10 orang, dan sisanya yaitu sebanyak 2 UKM (5%) memiliki modal sendiri berkisar antara Rp. 40.000.001,- s.d Rp. 50.000.000,-.

### Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan untuk menguji valid tidaknya suatu pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Untuk menguji validitas, dilakukan uji korelasi pada indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian. Proses penelitiannya dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing indikator tersebut terhadap jumlah indikator yang bersangkutan.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Butir kuesioner yang diuji	Hasil
1	Proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi	semua pertanyaan dinyatakan valid
2	Pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas dapat dinyatakan valid.	semua pertanyaan dinyatakan valid
3	Pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang terdapat	satu indikator yaitu pertanyaan nomor 7 tidak valid,
4	Penyusunan Laporan Keuangan hanya butir pertanyaan nomor 7 dinyatakan tidak valid.	semua pertanyaan dinyatakan valid
5	Penyusunan <i>Business Plan</i>	semua pertanyaan dinyatakan valid

Sumber: data primer diolah

### Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas untuk mengetahui apakah instrument pertanyaan penelitian cukup konsisten untuk mengukur gejala pada pengukuran yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan

menggunakan bantuan program SPSS. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 (Imam Ghozali, 2005). Berikut hasil dari reliabilitas dari 40 Pelaku Usaha yang diteliti:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbah Alpha</i>	Kriteria
Proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi	0.852	Reliabel
Pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas	0.874	Reliabel
Pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang	0.893	Reliabel
Penyusunan Laporan Keuangan	0.941	Reliabel
Penyusunan <i>Business Plan</i>	0.958	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa variabel Proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi, Pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas, Pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang, Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan *Business Plan* mempunyai nilai *Cronbach Alpha* di atas

0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi, Pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas, Pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang, Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan *Business Plan* adalah reliabel.

**Kemampuan UKM Dalam Proses Penerapan SAK-ETAP**

**Tabel 4**  
**Proporsi Kemampuan UKM dalam Penerapan SAK ETAP**

No	Variabel	Jumlah UKM yang mampu	
		Jumlah	%
1	melakukan proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi	29	72,5
2	pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas	29	72,5
3	pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang	35	87,5
4	kemampuan UKM dalam penyusunan laporan keuangan	22	55
5	Kesiapan UKM pada implementasi penerapan SAK-ETAP	19	47,5
6	Kesiapan UKM dalam penyusunan <i>Business Plan</i>	9	22,5

Sumber: Data primer diolah

**Hubungan Setiap Proses Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kesiapan UKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

**Tabel 5**  
**Hasil uji *Chi square***

No	Hubungan Variabel	Hasil	Kesimpulan
1	Kemampuan proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi dengan Kesiapan UKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan	nilai signifikansi sebesar 0,002 ( $\alpha < 0,05$ ).	terdapat hubungan yang signifikan
2	Kemampuan pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas dengan kesiapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan.	nilai signifikansi sebesar 0,217 ( $\alpha > 0,05$ ).	tidak terdapat hubungan yang signifikan
3	Kemampuan pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang dengan kesiapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan.	nilai signifikansi sebesar 0,044 ( $\alpha < 0,05$ ).	terdapat hubungan yang signifikan

Sumber: Data primer diolah

**Analisis Faktor Penyusunan Laporan Keuangan**

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Faktor**

No	Variabel	Hasil Analisis Faktor
1	Variabel penyusunan laporan keuangan	dari 22 indikator pertanyaan hanya 11 indikator yang bisa menjelaskan kemampuan UKM Kab. Semarang dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2	Variabel penyusunan <i>business plan</i>	22 indikator pertanyaan, semua indikatornya bisa menjelaskan kemampuan UKM Kab. Semarang dalam proses penyusunan <i>business plan</i> .

Sumber: Data primer diolah

**Rendahnya Kemampuan UKM dalam Menyusun Laporan Keuangan**

Sebagai salah satu persyaratan kredit pada dasarnya penyusunan laporan keuangan harus dilakukan oleh pengelola UKM. Dalam memberikan fasilitas pinjaman untuk kegiatan usaha, pihak perbankan senantiasa memperhatikan aspek legalitas (legalitas badan usaha dan legalitas transaksi), aspek kelayakan suatu kegiatan usaha serta kemampuan membayar kembali pinjaman yang diberikan (*repayment capacity*). Sebagai faktor pengaman (*security*), perbankan juga memerlukan adanya suatu jaminan (*collateral*) baik fisik maupun non fisik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pihak perbankan memerlukan laporan keuangan untuk beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan calon debitur. Kondisi kesehatan perusahaan utamanya mencakup kondisi likuiditas, kecukupan modal, porsi hutang, profitabilitas.
2. Untuk memperkirakan volume usaha calon debitur. Volume usaha ditunjukkan dengan besarnya aset dan penjualan.
3. Untuk memperkirakan kapasitas calon debitur dalam menanggung beban pinjaman yang ditunjukkan dalam perbandingan antara hutang dan

modal, hutang dan aset, serta besarnya laba usaha.

4. Untuk memperoleh gambaran sumber dan penggunaan dana selama beberapa periode terakhir. Diperoleh dengan membandingkan necara beberapa periode terakhir.
5. Untuk memperkirakan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada calon debitur.

Berdasar fakta tersebut, tentu saja ketidakmampuan UKM dalam menyusun Laporan keuangan akan menyebabkan gagalnya akses UKM dalam memperoleh kredit Perbankan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan banyaknya entitas usaha dengan skala kecil dan menengah, maka IASB menerbitkan acuan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan bagi entitas skala tersebut, yang disebut dengan *IFRS for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs)*. *IFRS for SMEs* merupakan modifikasi dan simplifikasi dari IFRS pokok yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan adanya standar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sederhana dan tidak banyak membebani pengguna. Terminologi SME yang dipergunakan oleh IASB diartikan sebagai "Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan bagi pengguna eksternal serta tidak memiliki akuntabilitas publik".

Sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar internasional, pada tanggal 16 Desember 2008 telah dilansir *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan beberapa modifikasi yang diperlukan. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa penyusunan laporan keuangan bukanlah sulit dan sangat mungkin untuk dilakukan oleh para pelaku UKM.

### **Rendahnya Kemampuan UKM dalam Menyusun Business plan (Rencana Usaha)**

Rendahnya kemampuan UKM dalam menyusun rencana usaha, akan menyebabkan UKM tidak mendapat kepercayaan dari pihak Perbankan dalam mengelola dan mengembalikan kreditnya. Ketiadaan Rencana usaha mengandung arti bahwa UKM belum mampu menggambarkan secara jelas apa, mengapa, bagaimana kegiatan itu dilakukan, dapat juga diartikan bahwa UKM tidak memiliki misi, tujuan dan sasaran, anggaran, perkiraan/prediksi keuangan, target pasar, strategi pencapaian sasaran serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Bagi UKM sendiri tidak disusunnya rencana usaha akan berakibat pada:

- a. Tidak adanya panduan bagi Pemilik/pengelola UKM untuk menjalankan usaha, menetapkan langkah-langkah prioritas, dan merencanakan langkah-langkah keuangan.
- b. Rendahnya akses UKM bilamana memerlukan pembiayaan dari perbankan/ lembaga pembiayaan. Pihak Kreditur memerlukan Rencana Usaha untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang rencana kegiatan perusahaan dan dapat menarik beberapa kesimpulan penting.
- c. Rendahnya akses UKM dalam memperoleh investor. Investor memerlukan rencana usaha utamanya untuk memperoleh gambaran mengenai risiko terkait dengan dana yang akan ditanamkan pada perusahaan/proyek dimaksud.

- d. Tidak adanya sarana komunikasi antara karyawan dengan tim manajemen. Dalam hal ini, seluruh anggota tim manajemen akan mempergunakan rencana usaha sebagai acuan dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.

### **SIMPULAN**

Program pengembangan UKM melalui peningkatan program pendanaan sebagaimana tercantum dalam APBSD, tampak sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi UKM di Indonesia saat ini yang merasa kesulitan dalam memperoleh pinjaman. Beberapa penyebab rendahnya akses UKM ke Perbankan antara lain disebabkan karena ketidakmampuan mereka menyusun Laporan Keuangan maupun proposal kelayakan usaha (*business plan*) seperti yang disyaratkan Bank Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut terutama dalam rangka menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN tahun 2015 perlu ada kajian tentang seberapa jauh kemampuan UKM dalam melakukan persiapan baik dalam hal *softskill* maupun infrastruktur, sehingga UKM mampu dan siap menghadapi era pasar keuangan bebas tersebut, khususnya dalam perluasan akses keuangan.

Penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk dapat digeneralisasi oleh UKM secara umum. Berdasar hasil kajian, diperoleh kesimpulan tentang kesiapan UKM menyongsong era globalisasi:

1. Kemampuan UKM menyusun Laporan Keuangan:  
Kemampuan menyusun Laporan Keuangan meliputi seluruh kemampuan pengelolaan manajemen keuangan sederhana, mulai dari pengelolaan dan pencatatan bukti transaksi, pencatatan dan pelaporan arus kas hingga ke pengelolaan jurnal, buku besar hingga menyusun Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi). Berikut hasil analisis yang diperoleh:

- a. Kemampuan UKM Pada Proses Pencatatan Transaksi Berdasarkan Bukti Transaksi:  
mayoritas UKM di Kabupaten Semarang yaitu 29 UKM dari 40 UKM yang diteliti (72,5%) telah mampu melakukan proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi yang ada. Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan bahwa UKM mampu melakukan proses pencatatan secara sederhana berdasar bukti transaksi yang dikelola.
- b. Kemampuan UKM pada pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas adalah 29 UKM dari 40 UKM yang diteliti (72,5%) telah mampu melakukan pencatatan arus keluar masuk kas dan membuat pelaporan arus kas sederhana. Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan bahwa UKM mampu melakukan pencatatan arus keluar masuk kas dan membuat pelaporan arus kas sederhana.
- c. Kemampuan UKM pada pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang. adalah 35 UKM dari 40 UKM yang diteliti (87,5%) telah mampu melakukan proses pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang dengan baik.
- d. Kemampuan UKM dalam penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh: hanya 22 UKM dari 40 UKM yang diteliti (55%) mampu menyusun laporan keuangan, sisanya 18 UKM (45%) belum pernah atau belum mampu menyusun laporan keuangan karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban.
- e. Kesiapan UKM dalam mengimplementasikan penerapan SAK-ETAP: terdapat 19 UKM (47,5%) UKM yang diteliti belum siap dalam mengimplementasikan penerapan SAK-ETAP. Meskipun terdapat 21 UKM yang telah siap namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk menandakan kesiapan (bila batas minimal untuk bisa dinyatakan siap jika mencapai > 80% Pelaku Usaha).
- f. Kesiapan UKM dalam Penyusunan *Business Plan*. Hanya 9 UKM (22,5%) yang pernah menyusun *Business Plan*, lainnya, 77,5% UKM yang diteliti belum pernah menyusun proposal rencana usaha. Berdasar hasil tersebut dapat diketahui bahwa akses UKM memperoleh dana di luar modal sendiri masih rendah disebabkan karena rendahnya kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha.
- g. Terdapat hubungan yang signifikan antara proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti dengan kesiapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 ( $\alpha < 0,05$ ).
- h. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan pencatatan arus keluar masuk kas dan pelaporan arus kas dengan kesiapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,217 ( $\alpha > 0,05$ ).
- i. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan pencatatan penjualan, persediaan barang dagangan, utang dan piutang dengan kesiapan UKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 ( $\alpha < 0,05$ ).
- j. Hasil pengolahan analisis faktor terhadap variabel penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa dari 22 indikator pertanyaan hanya 11 indikator yang bisa menjelaskan kemampuan UKM Kab. Semarang dalam proses penyusunan laporan keuangan
- k. Hasil pengolahan analisis faktor terhadap variabel penyusunan *business plan* menunjukkan bahwa dari 22 indikator pertanyaan, semua indikatornya bisa menjelaskan kemampuan UKM Kab. Semarang

dalam proses penyusunan *business plan*.

Berdasarkan hasil analisis maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesiapan UKM dalam menyongsong era liberalisasi ekonomi ASEAN melalui percepatan akses terhadap informasi,

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kab. Semarang, Statistik Kab. Semarang, 2010 (Katalog BPS : 33225.1001)

Bappeda, BPS Kab. Semarang, Kab. Semarang dalam Angka (Katalog BPS : 1102001 3322)

Giaoutzi, Maria, Peter Nijkamp and David J Storey (1988), *Small and Medium Size Enterprises and Regional Development*, Routledge, London

Hatten, S., Timothy. *Small Business-Entrepreneurship and beyond*, 1997

Hayter, Roger (2000), *The Dynamic of Industrial Location: The Factory, The Firm and The Production System*, New York: John Wiley and Sons

Kimura, Fukunari (2002), Subcontracting and Performance of Small and Medium Firm in Japan, *Small Business Economics* 18: 163-175

Nugent, Jeffry B and Seung Jae Yhee (2002), Small and Medium Enterprises in Korea: Achievement, Constraints and Policy Issues, *Small Business Economics* 18: 85-119

Parasuraman, A Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. 1988. Serqual: A multiple Item Scale for Measuring Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*.

Porter, Michael E (1998), *The New Economic of Competition*, Harvard Business Review

khususnya informasi keuangan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pelatihan pembuatan *business plan* sebagai sarana untuk mengakses perolehan modal pinjaman dari Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012

Ratih Sulistyastuti, Dyah (2004), *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999 – 2001*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 143-164

Rencana Kerja UKM Center Kabupaten Semarang.2010

Sekaran, Uma, 1992. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach* "second Edition, Jhon Wiley & Sons Ltd. New York.

Singarimbun, Masri, dan Effendi Sofyan (Editor), 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.

Tambunan, Tulus (2000), *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Tambunan, Tulus (2009), *UMKM di Indonesia*: Bogor, Ghalia Indonesia

Tashakkori, Abbas. Charles Teddlie. *Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar, 2010

Urata, Shujiro (2000), *Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia*, JICA, Tokyo

-----, UU RI No. 9 tahun 1995 tentang UMKM

-----, UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM